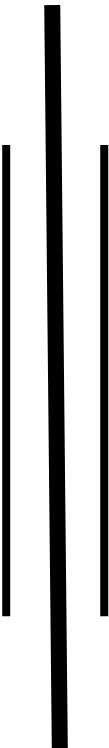


**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS
(TAHUN 2017 – 2022)**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi Negara untuk melayani masyarakat, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Rancangan Akhir Renstra 2017 – 2022, merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Rancangan Akhir Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Rancangan Akhir Renstra disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu kegiatan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Renstra juga untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2017
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh**

Ir. Syukri, M. Sc
Pembina Utama Muda /
NIP. 19591231 199003 1 025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	7
2.2. Sumber Daya SKPD.....	9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	18
	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	59
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	65
3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh.....	68
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	71
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	71
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi SKPD.....	72
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	73
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	74
	77

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	79
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan persandian. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Diskominfotik telah menyiapkan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra Diskominfotik akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfotik (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009–2029 (revisi), sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan

demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfotik, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja. Mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana strategis Diskominfotik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan
 - Nomor : 28 Tahun 2010
 - Nomor : 0199/M PPN/04/2010
 - Nomor : PMK 95/PMK 07/2010tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027;
22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (revisi);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dan *stakeholders* lainnya di dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dengan berbagai sumber dana, baik dari APBN, APBA, dan APBK Banda Aceh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Diskominfotik Kota Banda Aceh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBK.

2. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum pelayanan SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Maupun Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Menyamakan persepsi dari seluruh potensi sumber daya yang ada pada lingkup Diskominfo agar mampu menjawab tuntutan aspirasi yang semakin kritis dan beragam;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Diskominfo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Diskominfo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 adalah untuk :

1. Mengimplementasikan program-program RPJMD sehingga dapat mencapai visi Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah.
2. Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh *stakeholder*.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Diskominfo

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kota Banda Aceh
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dalam Lingkup Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Banda Aceh di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- a. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang statistik;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota Banda Aceh di bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang statistik;
- d. Pembinaan teknis dibidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang statistik;
- e. Pengawasan dan pengendalian dibidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang statistik;
- f. Penelitian dibidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang statistik;
- g. Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan *search and rescue* di Kota Banda Aceh;
- h. pembinaan UPTD ; dan

- i. Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan petunjuk Walikota.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor: 54 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
 - 2. Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. Bidang E-Government, membawahi
 - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
- e. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - 1. Seksi Layanan Hubungan Media
 - 2. Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City
- f. Bidang Statistik, membawahi :
 - 1. Seksi Survei Sektoral
 - 2. Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang , Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umumdi
bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- e. Pembinaan teknis di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- f. Pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi, Informatika dan
Statistik;
- g. Pembuatan rencana teknis pembangunan tower komunikasi yang
mengacu Pada standar yang berlaku;
- g. Perencanaan tata ruang bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;

- h. Penelitian bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- Pelaksanaan kerjasama pembinaan *Search And Rescue* (SAR);
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- k. Pembinaan UPTD;
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- m. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- n.
- h.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, koordinasi penyusunan program, pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan aset serta penataan arsip dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan keuangan dan aset dinas;
- f. Penataan arsip, dokumentasi dan kepustakaan;

- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga dinas;
- Pelaksanaan pengawasan dan di bidang kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- j.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;

- Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,
- b. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi

c. untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f.

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan

Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan
c. Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraaan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e.

f.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas bidang Statistik Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;

- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;

- Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

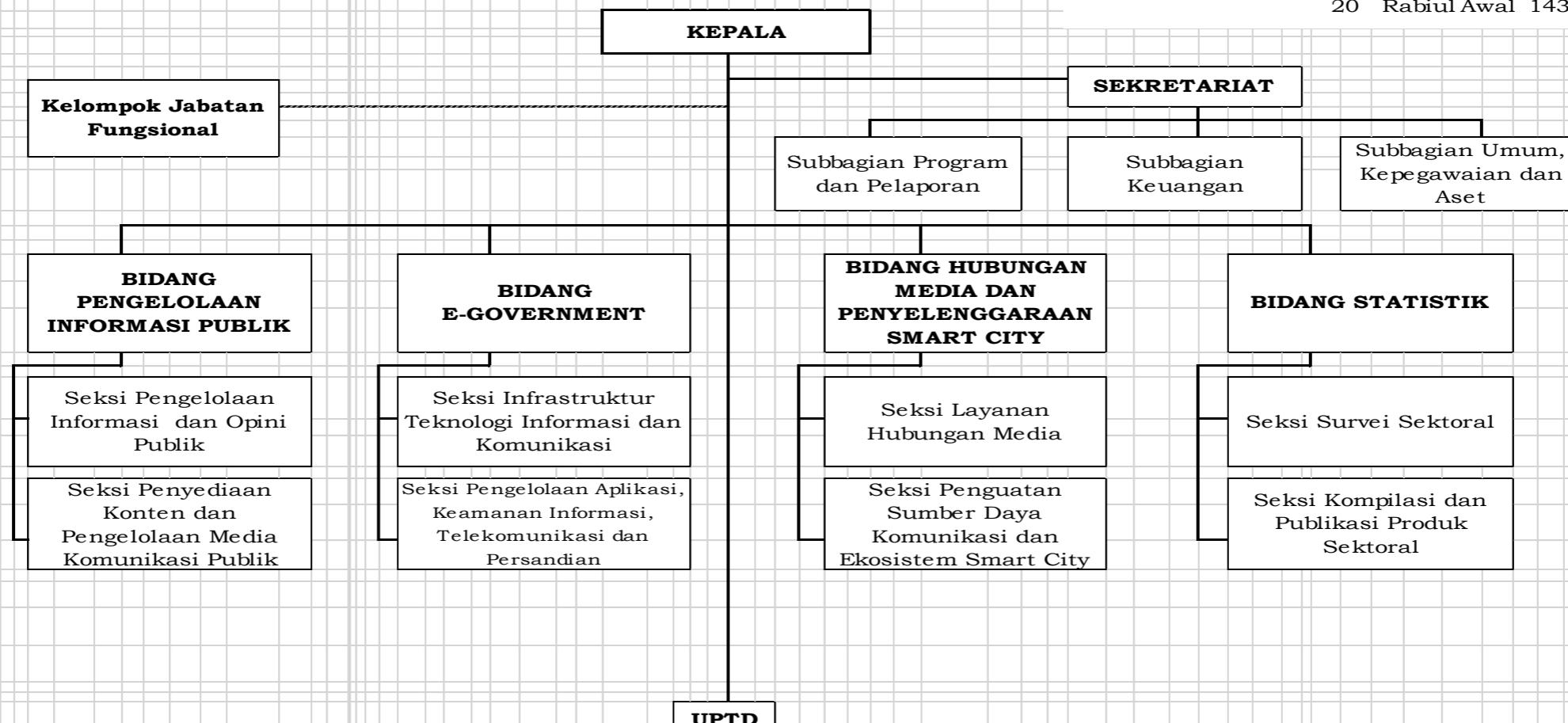
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

e.

f.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor : 54 Tahun 2016
Tanggal : 20 Desember 2016 M
20 Rabiul Awal 1438 H

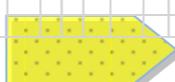


Keterangan :

- : Garis Atasan Langsung
- - - : Garis Pembinaan

Plt. WALIKOTA BANDA ACEH

HASANUDDIN



2.2. Sumber Daya SKPD

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	IV/c	1	-	1	
	IV/b	1	-	1	
	IV/a	2	1	3	
	III/d	5	3	8	
	III/c	4	-	4	
	III/b	3	4	7	
	III/a	-	1	1	
	II/d	1	-	1	
	II/c	-	-	-	
	II/b	2	1	3	
	II/a	-	-	-	
	I/d	-	-	-	
13	Jumlah PNS	19	10	29	
	Non PNS				
	Peg. Kontrak	16	1	17	
	Peg. Honor	-	-	-	

Jumlah Non PNS	17	-	17	
JML PNS + NON PNS	35	11	46	

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh , Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfotik Kota Banda Aceh sebanyak 46 orang.

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	11
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		17

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh , Tahun 2017

Tabel 2.2.3.

Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	5
2	S 1	15
3	D IV	0
3	D III	0
4	SLTA/Sederajat	9
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	29

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang, tingkat S1 sebanyak 15 orang, tingkat SLTA sebanyak 9 orang, dan jumlah keseluruhan PNS 29 orang.

Tabel 2.2.4.

Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	-
2	S pama / PIM - III	5
3	Adum / PIM - IV	10
jumlah		15

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja SKPD adalah ketersediaan barang-barang inventaris Diskominfotik Kota Banda Aceh untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran kegiatan pada Diskominfotik Kota Banda Aceh. Pengadaan barang-barang inventaris tersebut berasal dari dana APBK, APBA, APBN dan juga bantuan dari pihak lain. Rincian barang-barang inventaris tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut:

Tabel 2.2.5.

Rekapitulasi Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit	
1	Peralatan dan Mesin a. Alat-alat kantor dan rumah tangga	1	unit
2	Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	1	unit
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan a. Instalasi Listrik	1	Jaringan

Sumber : Subbag. Umum Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Catatan: sampai dengan per april 2017 belum ada pembagian aset antara Diskominfo dan Dishub.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

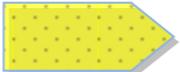
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Melalui kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi yaitu meningkatkan informasi bagi masyarakat melalui penyediaan jaringan website gampong, diantaranya telah membangun /mengembangkan Website gampong Setui Kecamatan Meuraxa pada tahun 2011 dengan dana APBK (melalui dana Aspirasi Anggota Dewan)
6. Penyebarluasan Informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yaitu penyediaan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah melalui baliho, spanduk, siaran radio, siaran televisi dan jasa muatan berita koran.
7. Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dan lintas sektoral.
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
	INDIKATOR SPM (Permenkominfo No. 22/2010)																		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional																		
	1.1 media massa	12kali/thn			12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	100%	100%	100%	100%		
	1.2 media online	setiap hari			setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100%	100%	100%	100%		
	1.3 media tradisional pertunjukan rakyat	12kali/thn			12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	100%	100%	100%	100%		
	1.4 media interpersonal	12kl/thn/kec			12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	12kl/thn/k ec	100%	100%	100%	100%		
	1.5 media luar ruang	12kali/thn			12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	100%	100%	100%	100%		
2	Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat																		
	2.1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan	50%			50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	200%	200%	200%	200%		



	INDIKATOR (Permendagri No.54 / 2010)													
1	Website milik pemerintah daerah											44		
2	Pameran expo						1	1	1	1	1			
3	Layanan koneksi jaringan internet dan intranet dilingkungan pemkot						setiap hari	setiap hari	365	365	365	100%	100%	
4	Pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan TIK						1 kali/tahun	100%	100%					
5	Jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government (aplikasi)						4 aplikasi							
6	Jumlah jaringan komunikasi						-	-	-	-	-			
7	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk								0,284	0,272	0,261	0,25		
8	Jumlah surat kabar nasional							10	10	10	10			
9	Jumlah surat kabar lokal							18	18	18	18			
10	Jumlah penyiaran radio							17	17	17	17			
11	Jumlah penyiaran tv lokal							14	14	14	14			
12	Sistem informasi manajemen pemda							4	4	4	4			

Banda Aceh, 10 Februari 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika



dan Statistik Kota Banda Aceh

Ir. Syukri, M.Sc

Pembina Utama Muda/Nip. 195912311990031025



Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh seperti pada tabel 2.1 di atas dibagi berdasarkan 3 indikator yaitu: indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator Permendagri dan indikator lainnya yang dirasa perlu oleh diskominfotik. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan yaitu indikator SPM Menteri Komunikasi dan Informatika (No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010) untuk capaian tahun 2017 sampai dengan 2022.

Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfotik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tersedianya koneksi jaringan intranet antar SKPD;

Indikator SPM Pelayanan jaringan intranet dihitung berdasarkan Jumlah SKPD yang terkoneksi intranet dibagi dengan jumlah SKPD dikali dengan 100%. Besar persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1

Tersedianya koneksi jaringan intranet antar SKPD

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Layanan koneksi internet	Setiap hari	Setiap hari
2	Jumlah pembangunan aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi
3	Sistem informasi manajemen pemda	4 aplikasi	4 aplikasi

Sumber : Bidang E-Gov Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

2. Media massa

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televisi dihitung sebesar 12 kali pertahun. Capaian indikator SPM media massa pada Diskominfo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.16

Media Massa

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Media Massa (seperti majalah, radio dan televisi)	12 kali	12 kali

Sumber : Bidang Komtel Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk media massa pada tahun 2016-2017 telah tercapai sesuai dengan target SPM yaitu 12 kali pertahun (100%)

3. Media Online (Website)

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media online (website) dihitung setiap hari atau 365 hari setiap tahunnya. Capaian indikator SPM media online (website) pada Diskominfotik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.17

Media Online (Website)

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Media Online (Website)	365 kali	365 kali

Sumber : Bidang Komtel Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa diseminasi informasi nasional melalui media online (website) sudah sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh tersedianya jumlah SDM yang bertugas untuk mengupload informasi ke media online (website).

4. Media Tradisional

Tidak adanya pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media tradisional (seperti pertunjukan rakyat). Capaian indikator SPM media tradisional pada Diskominfotik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.18

Media Tradisional

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Media tradisional (seperti pertunjukan rakyat)	12	12

Sumber : Bidang Komtel Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi diseminasi informasi nasional melalui media tradisional pada tahun 2014 maupun tahun 2015 tidak terdapat kegiatan sama sekali, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia pada Diskominfotik Kota Banda Aceh.

5. Media Interpersonal

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal (seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan loka karya) dihitung sebesar 12 kali pertahun setiap kecamatan. Capaian indikator SPM media interpersonal pada Diskominfotik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.19

Media Interpersonal

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Media Interpersonal	12 kali	12 kali

Sumber : Bidang Komtel Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Realisasi diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal juga menunjukkan perkembangan. Sama seperti media tradisional, capaian yang diperoleh disebabkan anggaran yang tersedia pada Diskominfotik Kota Banda Aceh.

6. Media Luar Ruangan

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media luar ruangan seperti buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk dan baliho dihitung sebesar 12 kali pertahun. Capaian indikator SPM media luar ruangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.20

Media Luar Ruangan

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Media luar ruangan (seperti buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk & baliho)	12 kali	12 kali

Sumber : Bidang Komtel Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja untuk media luar ruangan pada tahun 2014-2015 telah tercapai sesuai dengan nilai SPM yaitu 12 kali pertahun (100%).

7. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. Capaian indikator SPM pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.21

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah KIG	9	9
2	Jumlah Kecamatan	9	9
3	Rasio KIG	100%	100%

Sumber : Bidang Komtel Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan.

8. Jumlah jaringan komunikasi

Indikator jaringan komunikasi dihitung berdasarkan jumlah jaringan telepon genggam dibagi dengan stasioner. Pada Tahun 2007

jaringan telepon seluler terdapat 32 BTS, namun seiring meningkatnya pemakaian ponsel maka para pengusaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa telekomunikasi (Provider) menambah BTS nya sehingga pada tahun 2015 telah berjumlah 73 BTS. Untuk stasioner sampai dengan saat ini belum terdaftar.

Pertumbuhan jaringan telepon genggam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1.30
Jumlah jaringan komunikasi

NO	INDIKATOR	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	KET
1	Jumlah jaringan telepon genggam	-	-	-	-	-	
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	-	-	-	-	-	belum terdaftar

Sumber : Bidang PSI/Komtel Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

9. Rasio Wartel/Warnet terhadap penduduk

Capaian kinerja rasio warnet/wartel diukur berdasarkan jumlah warnet/wartel dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100%. Pada tahun 2007 jumlah Wartel di Kota Banda Aceh sebanyak 12 unit usaha, namun seiring dengan kemajuan dan perkembangan TIK maka pengguna jasa wartel mulai berkurang karena masyarakat telah beralih menggunakan telepon seluler, sehingga usaha dibidang jasa telekomunikasi (wartel) tidak beroperasi lagi. Sebaliknya, pengelola jasa warnet terus tumbuh dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 hanya berjumlah 48 unit usaha, dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 70 unit usaha.

Rasio jumlah warnet/wartel berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 2.1.31

Rasio Warnet/Wartel Terhadap Penduduk

No	Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jlm Penduduk	228,562	234,971	249,282	267.340	267.340
2	Jumlah Wartel	0	0	0	0	0
3	Jumlah warnet	68	77	89	40	78
4	Rasio wartel	0	0	0	0	0
5	Rasio warnet	0,284	0,272	0,261	0,250	0,239

Sumber : Bidang PSI/Komtel Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

10. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan media komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan, dan bentuk karangan yang lain. Semakin banyak jumlah jenis surat kabar terbitan nasional/lokal di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Jumlah Surat Kabar terbitan Nasional yang masuk ke daerah setiap tahunnya tetap, pada tahun 2015 10 (sepuluh) jenis surat kabar dan pada tahun 2017 adalah 10 (sepuluh) jenis surat kabar. Sementara surat kabar terbitan lokal semakin bertambah, pada tahun 2015 terdapat 10 (sepuluh) jenis surat kabar dan pada tahun 2017 tinggal 18 (delapan belas) jenis surat kabar. Jumlah surat kabar terbitan nasional dan lokal pada Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1.32

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

No	Jumlah surat kabar	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	10	10	10	10	10
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	18	18	18	18	18

3	Total jenis surat kabar (1+2)	28	28	28	28	28
---	----------------------------------	----	----	----	----	----

Sumber : Bidang PSI/Komtel Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2017

11. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pertumbuhan penyiaran radio lokal yang pada tahun 2013 18 (delapan belas) penyiaran, pada tahun 2015 adalah 17 (tujuh belas) penyiaran. Sedangkan penyiaran Radio Nasional dari tahun 2013 adalah 1 (satu) penyiaran dan tahun 2015 3 (tiga) penyiaran. Media elektronik televisi lokal mulai melakukan penyiaran pada tahun 2011 adalah 2 (dua) penyiaran dan tahun 2015 adalah 3 (tiga) penyiaran. Sedangkan penyiaran televisi nasional pada tahun 2011 adalah 6 (enam) penyiaran dan pada tahun 2015 hanya 1 (satu) penyiaran. Jumlah penyiaran Radio/TV yang ada dalam Kota Banda Aceh terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2.1.33

Jumlah penyiaran Radio/televisi

NO	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Jumlah penyiaran radio lokal	17	17	17	17	17
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	14	14	14	14	14
4	Jumlah penyiaran TV Nasional	6	6	6	6	6

Sumber : Bidang PSI/Komtel Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2017

12. Website Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Banda Aceh telah memiliki website resmi yaitu <http://bandaacehkota.go.id>. Sementara itu beberapa SKPK juga telah memiliki website resmi termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yaitu <http://dishubkominfotik.bandaacehkota.go.id>.

13. Pameran/Expo

Pameran/Expo sering dilaksanakan dalam rangka ulang tahun Kota Banda Aceh. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh pada tahun 2009 mengikuti even tersebut dengan tujuan untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik kepada warga Kota.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik diantaranya yaitu:

- 1) Terbatasnya jumlah pegawai yang memiliki SDM bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 2) Terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan TIK
- 3) Sarana komunikasi yang dimiliki masyarakat lebih maju/lebih canggih dibandingkan dengan yang digunakan oleh petugas/pengelola informasi.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh

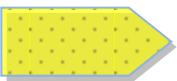
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
PENDAPATAN	4.375.000.000	4.875.000.000	7.125.000.000	8.150.000.000	8.715.000.000	4.774.842.440	5.586.283.710	6.120.451.385	6.863.264.060	7.520.992.790	109	115	86	84	86	19,73%	12,07%
Pendapatan Asli Daerah	4.375.000.000	4.875.000.000	7.125.000.000	8.150.000.000	8.715.000.000	4.774.842.440	5.586.283.710	6.120.451.385	6.863.264.060	7.520.992.790	109	115	86	84	86	19,73%	12,07%
- Pend. Retribusi Daerah	4.375.000.000	4.875.000.000	7.125.000.000	8.150.000.000	8.715.000.000	4.774.842.440	5.586.283.710	6.120.451.385	6.863.264.060	7.520.992.790	109	115	86	84	86	19,73%	12,07%
BELANJA DAERAH	15.403.210.325	17.862.934.675	24.085.676.510	27.330.229.072	33.941.917.920	14.516.616.616	16.818.486.350	23.344.436.417	26.988.102.523	33.534.449.024	94	94	97	99	99	22,12%	23,63%
Belanja Tidak Langsung	9.830.174.605	10.021.240.705	10.123.080.797	10.299.736.209	10.172.676.340	9.054.956.318	9.256.657.358	9.882.487.180	10.157.731.354	10.155.297.352	92	92	98	99	100	0,87%	2,94%
- Belanja Pegawai	9.830.174.605	10.021.240.705	10.123.080.797	10.299.736.209	10.172.676.340	9.054.956.318	9.256.657.358	9.882.487.180	10.157.731.354	10.155.297.352	92	92	98	99	100	0,87%	2,94%
Belanja Langsung	5.573.035.720	7.841.693.970	13.962.595.713	17.030.492.863	23.769.241.580	5.461.660.298	7.561.828.992	13.461.949.237	16.830.371.169	23.379.151.672	98	96	96	99	98	45,08%	45,10%
- Belanja Pegawai	1.132.500.000	1.596.650.000	2.552.950.000	2.772.766.000	2.014.655.000	1.115.694.869	1.535.945.714	2.261.908.125	2.724.046.000	1.973.200.000	99	96	89	98	98	20,54%	19,45%
- Belanja Barang / Jasa	2.047.359.720	2.184.717.500	2.349.618.700	3.624.498.802	4.834.941.619	1.987.616.929	1.997.515.818	2.184.918.462	3.497.321.669	4.582.608.872	97	91	93	96	95	25,48%	25,24%
- Belanja Modal	2.393.176.000	4.060.326.470	9.060.027.013	10.633.228.061	16.919.644.961	2.358.348.500	4.028.367.460	9.015.122.650	10.609.003.500	16.823.342.800	99	99	100	100	99	67,32%	67,72%

Banda Aceh, 10 Februari 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh

Ir. Syukri, M.Sc

Pembina Utama Muda/Nip. 195912311990031025



Rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 92 s/d 100 persen. Belanja tidak langsung hanya membiayai belanja gaji pegawai dan insentif lainnya. Untuk Belanja Langsung rasionya rata-rata mencapai 96 s/d 99 persen. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai untuk membiayai honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pertumbuhan anggaran sangat tergantung dengan ketersedianya alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Pembangunan telah tertapung dalam RPJM dan dijabarkan dalam Renstra SKPD untuk pembiayaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala prioritas, dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Rentra.
- b. Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun SDM belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya.
- d. Pada sisi program dan kegiatan masih terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD sehingga anggaran yang tersedia sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan belanja langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan kondisi existing, maka diperlukan suatu proyeksi kondisi yang diinginkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan 2017 -2022. Proyeksi tersebut kemudian digunakan sebagai indikator tujuan dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Adapun proyeksi kondisi 5 tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
2. Peningkatan pengembangan data dan statistik daerah
3. Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
4. Peningkatan pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
5. Peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi
6. Peningkatan kerjasama informasi dan media massa

Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya diterapkan analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strength dan weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (opportunities dan threats), maka kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang melekat baik pada pemerintah maupun masyarakat dapat diidentifikasi atas keempat aspek positif dan negatif dari organisasi di dalam menentukan strategi yang tepat dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths)

1. Tersedianya pegawai
2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas
3. Adanya kerjasama antar staf yang baik
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai
5. Adanya komitmen pimpinan
6. Tersedianya dana penunjang

Kelemahan (weaknesses)

1. Rendahnya motivasi kerja aparatur
2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang komunikasi, informatika dan statistik
3. Tidak meratanya beban kerja
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian
5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi

6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

Peluang (Opportunity)

1. Letak geografis yang strategis
2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya
5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi

Tantangan (threat)

1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi
2. Belum adanya rencana umum informasi, komunikasi dan statistik yang baik
3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru
4. Adanya tuntutan perencanaan bidang komunikasi, informatika dan statistik yang berkualitas
5. Adanya kekayaan potensi bidang komunikasi, informatika dan statistik yang belum tergarap secara maksimal

Pencermatan Lingkungan Strategik

Pencermatan Lingkungan Stratejik adalah untuk mencermati tentang **"kekuatan"** dan **"Kelemahan"** internal, **"Tantangan dan Peluang"** eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, masa kini dan berorientasi yang diperkirakan akan muncul di masa depan .

Pencermatan Lingkungan Stratejik meliputi antara lain situasi dan kondisi awal Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh (struktur, penempatan personil, efektifitas, kegiatan), efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaannya, serta faktor-

faktor lain yang mendukung terciptanya produk perencanaan yang berkualitas.

Tabel 2.4.1
Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal

PLI	PLE
<u>Kekuatan (Strengths)</u>	<u>Peluang (Opportunities)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya pegawai 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas 3. Adanya kerjasama antar staf yang baik 4. Tersedianya sarana kerja yang memadai 5. Adanya komitmen pimpinan 6. Tersedianya dana penunjang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis yang strategis 2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih 3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya 5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi
<u>Kelemahan (Weaknesses)</u>	<u>Tantangan (Threats)</u>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya motivasi kerja aparatur 2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 3. Tidak meratanya beban kerja 4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian 5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi 6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi 2. Belum adanya rencana umum transportasi perkotaan yang baik 3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru 4. Adanya tuntutan perencanaan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang berkualitas 5. Adanya kekayaan potensi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal.

Tabel 2.4.2
Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)

No	Faktor-Faktor Internal Stratejik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
----	----------------------------------	-------	--------	-------	-----------

1.	<u>Kekuatan (Strengths)</u>				
	1. Tersedianya pegawai	15	4	60	I
	2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas	10	4	40	III
	3. Adanya kerjasama antar staf yang baik				
	4. Tersedianya sarana kerja yang memadai				
	5. Adanya komitmen pimpinan	5	4	20	IV
	6. Tersedianya dana penunjang	5	3	15	V
	<u>Kelemahan (Weaknesses)</u>				
2.		5	3	15	VI
	1. Rendahnya motivasi kerja aparatur	10	4	40	II
	2. Rendahnya kemampuan profesional aparatur di bidang komunikasi dan informatika				
	3. Tidak meratanya beban kerja				
	4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian	10	3	30	III
	5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi	15	3	45	I
	6. Pejabat struktural belum seluruhnya sesuai dengan kompetensinya.				
		5	3	15	IV
		5	2	10	VI
		10	4	40	II
		5	3	15	V
	JUMLAH	100			

Keterangan : R4: Sangat menonjol, R3: Menonjol, R2: kurang menonjol dan R1: tidak menonjol.

Tabel 2.4.3
Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)

No	Faktor-Faktor Internal Stratejik	Bobot	Rating	Score	Prioritas
1.	<u>Peluang (Opportunities)</u>				
	1. Letak geografis yang strategis	5	3	15	IV
	2. Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota terpilih	10	3	30	II
	3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	15	4	60	I
	4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan stake holder lainnya				
	5. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi	10	3	30	III
	<u>Tantangan (Threats)</u>				
	1. Tidak konsistensinya penerapan regulasi	10	3	30	V
	2. Belum adanya rencana umum informatika yang baik				
	3. Belum adanya ketetapan qanun RTRW yang terbaru				
2.	4. Adanya tuntutan perencanaan bidang komunikasi dan informatika yang berkualitas				
	5. Adanya kekayaan potensi bidang komunikasi dan informatika yang belum tergarap secara maksimal	5	4	20	IV
		10	4	40	III
		5	4	20	V
		10	4	40	II

		15	4	60	1
	JUMLAH	100			

Keterangan : R4 : Sangat menonjol, R3 : Menonjol, R2. kurang menonjol dan R1 : tidak menonjol.

Kesimpulan Analisis Faktor Internal dan Eksternal (KAFI-KAFE)

- ❖ **Dari keenam kekuatan (Strengthness) dalam analisis pencermatan internal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah;
 - 1) ketersediaan personil;
 - 2) ketersediaan dana penunjang;
 - 3) Tugas pokok dan fungsi yang jelas,
 - 4) Kerjasama antar staf yang baik
- ❖ **Dari keenam kelemahan (Weaknesses) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah;
 - 1) kemampuan profesional aparatur di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh masih rendah ;
 - 2) Pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi belum efektif;
 - 3) Rendahnya motivasi kerja aparatur;
 - 4) Belum meratanya beban kerja.
- ❖ **Dari kelima Peluang (Opportunities) dalam analisis pencermatan Eksternal,** maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah;

- 1) Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- 2) Adanya dukungan dari walikota dan wakil walikota;
- 3) Adanya dukungan dana/kegiatan dari Provinsi NAD;
- 4) Adanya donor dan NGO.

- ❖ **Dari kelima Tantangan (Threats) dalam analisis pencermatan Eksternal**, maka yang menjadi kesimpulan prioritas adalah;
- 1). Adanya kekayaan potensi bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang belum tergarap secara maksimal;
 - 2). Adanya tuntutan perencanaan bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang berkualitas;
 - 3). Tidak konsistensinya penerapan regulasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki permasalahan antara lain:

1. Bidang Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai.
2. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK.
3. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

3.1.5. Bidang Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai.

Minimnya sarana komunikasi terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat dan fasilitas siaran lainnya, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

31.6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK.

Sampai dengan saat ini terkait dengan korespodensi belum ada tenaga/pegawai yang yang telah mengikuti Pendidikan Bidang Fotografer dan peliputan berita, juga sangat terbatasnya SDM yang mengelola TIK.

31.7. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Aceh, sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini belum tersedia.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota

3.2.1 Telaah Visi

Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 yaitu: **Mewujudkan Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah.** Kota Banda Aceh Gemilang adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlaq mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Lebih lanjut, masyarakat madani harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1 Masyarakat yang beriman dan berakhlaq
- 2 Persatuan dan kesatuan umat, tidak fanatis terhadap ikatan-ikatan kesukuan
- 3 Tegaknya hak-hak asasi manusia dan tidak adanya kesewenang-wenangan
- 4 Egaliterisme, anti-feodalistik, anti-otoriterisme, ruang publik yang luas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan
- 5 Masyarakat yang memiliki hukum dan taat hukum, tidak barbarian, dan tegaknya supremasi hukum
- 6 Masyarakat yang inklusif, toleran dalam perbedaan, dan kemampuan untuk bekerjasama dalam menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan
- 7 Keadilan sosial bagi seluruh umat.

Demi terwujudnya sebuah kota gemilang perlu didukung oleh keberadaan dinas/lembaga/badan/kantor pemerintah yang memahami tugas dan fungsinya. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh merupakan *leading sector*

penyelenggaraan pelayanan penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan dan perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Diskominfotik telah menyiapkan sarana dan prasarana informasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi walikota/Wakil Walikota Banda Aceh yang akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja SKPD.

3.2.2 Telaah Misi

Telaahan Visi, Misi dan progam Walikota dan Wakil Walikota terpilih terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdapat pada Misi ke-5 dalam RPJM Kota Banda Aceh yaitu **Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang Islami.**

Uraian lebih detil dalam mewujudkan misi ke-5 dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan Kapasitas SDM bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan SDM yang menguasai TIK	Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika	Presentase pegawai yang menguasai IT
2	Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Meningkatkan koneksi jaringan intranet antar SKPD	Terkoneksinya SKPD dengan jaringan intranet	Jumlah SKPD yang terkoneksi
3	Menyediakan data statistik yang	Membangun data Statistik yang terintegrasi	Tersedianya data SKPD yang	Persentase data yang

	berkualitas dan terintegrasi		berkualitas dan terintegrasi	berkualitas dan terintegrasi
4	Membangun sistem aplikasi SKPD yang berkualitas dan terintegrasi	Mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang telah terbangun	Terintegrasinya sistem aplikasi SKPD	Persentasi aplikasi yang terintegrasi
5	Menjadikan data sebagai sumber berita dan informasi	Menyediakan data dan informasi yang akurat	Tersedianya data dan informasi yang update	Jumlah data dan informasi yang update
6	Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK	Melakukan Diseminasi Informasi kepada masyarakat	Meningkatnya layanan dan keterbukaan informasi publik	Persentase informasi publik

3.3 Telaah Renstra Diskominfotik dan Renstra Kota Banda Aceh

Keterkaitan Rencana Stratejik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan dokumen perencanaan lintas instansi lainnya akan sangat berhubungan mengingat semua aplikasi hasil perencanaan tersebut akan bersinggungan langsung dengan tugas pokok, peran dan fungsi Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam melakukan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, maka digunakan strategi yaitu:

- a. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika ke sub-sub pusat kota;
- b. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika untuk meningkatkan aksesibilitas kota dari kawasan sekitar;
- c. Mengembangkan jaringan prasarana telekomunikasi pada kawasan yang didorong perkembangannya di bagian selatan;

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Infrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah jaringan intrakoneksi guna penunjang kelancaran hubungan antar SKPD.
2. Kurangnya prasarana dan fasilitas komunikasi.
3. Masih rendahnya Kesadaran memakai jasa komunikasi dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan telekomunikasi.
4. Keterbatasan anggaran dalam rangka pengembangan TIK.
5. Diseminasi (penyebarluasan) informasi publik belum memadai.
6. Kurangnya SDM Bidang Korespodensi (berita) dan TIK.
7. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Rentra, visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Visi Dinas Komunikasi Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 adalah : “**TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TIK MENUJU MASYARAKAT BANDA ACEH GEMILANG YANGN ISLAMI**”. Visi tersebut sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh.

Adapun Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan kapasitas SDM bidang teknologi komunikasi dan Informatika;*
2. *Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;*
3. *Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintetrasи;*
4. *Membangun sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi;*

5. *Menjadikan data sebagai sumber berita dan informasi;*
6. *Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK.*

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional
2. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
3. Mewujudkan tersedianya data statistik yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
4. Mewujudkan pembangunan sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
5. Mewujudkan data sebagai sumber berita dan informasi
6. Menyediakan data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimal berbasis Informasi dan Teknologi (IT)

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik
2. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
3. Peningkatan tersedianya data statistik yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh
4. Peningkatan sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi
5. Peningkatan data sebagai sumber berita dan informasi
6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat. Berbasis IT

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh pada Tabel 4.1

Lampiran IV

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik	Tersedianya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan public	15%	15%	15%	15%	15%
2	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	10%	10%	10%	10%	10%
3	Mewujudkan tersedianya data statistik yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	Peningkatan tersedianya data statistik yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	Meningkatnya data statistik yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	10%	10%	10%	10%	10%
4	Mewujudkan pembangunan sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	Peningkatan sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi	Terlaiyarnya SKPK dengan aplikasi yang berkualitas dan terintegrasi	15%	15%	15%	15%	15%
5	Mewujudkan data sebagai sumber berita dan informasi		terpenuhinya data sebagai sumber berita dan informasi	0,5%	10%	10%	10%	0,5%



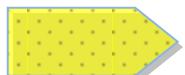
		Peningkatan data sebagai sumber berita dan informasi						
6	Menyediakan data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimal berbasis Informasi dan Teknologi (IT)	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat. Berbasis IT	terpenuhinya data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimal berbasis Informasi dan teknologi (IT)	0,5%	10%	10%	10%	0,5%

Banda Aceh, 13 Maret 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh

Ir. Syukri M. Sc.

Nip. 19591231 199003 1 025



4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti memiliki sertifikasi di bidang IT
2. Membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan jumlah data statistik yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.
4. Membangun sarana sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.
5. Meningkatkan data sebagai sumber berita dan informasi
6. Meningkatkan Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat. Berbasis IT serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan Aparatur dalam segala bentuk Bimtek teknis guna meningkatkan SDM dan pelayanan publik
2. Melaksanakan penataan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
3. Meningkatkan pengelolaan data statistik yang berkualitas dan terintegritas.

4. Meningkatkan pelayanan sistem aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi.
5. Meningkatkan data sebagai sumber berita dan informasi.
6. Melakukan koordinasi, penerapan Informasi Teknologi dan kerja sama dengan Instansi terkait serta Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan berbasis TIK

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Diskominfoik untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.8. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.9. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
 - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
 - 3.2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
4. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - 4.1. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
 - 4.2. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
5. Kerjasama Informasi dengan Media Masa
 - 5.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - 5.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 5.3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh terlampir dalam tabel 5.1.

TABEL 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21		
Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, amanah dan profesional	Meninjkatnya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan Publik	Tersedianya Aparatur yang berkualitas dalam pelayanan publik	1 25 01 02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	910.7 04.90 0	100%	956.2 40.14 5	100%	1.004. 052.1 52	100%	1.054. 254.7 60	100%	1.106. 967.4 98	100%	5.032. 219.45 5	Diskominfotik			
			1 25 01 02	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik	Berfungsiya sarana Komunikasi, Listrik dan SDA	12 bln	12 bln	80.45 7.300	12 bln	84.48 0.165	12 bln	88.70 4.173	12 bln	93.13 9.382	12 bln	97.79 6.351	60 bln	444.57 7.371				
			1 25 01 06	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

					Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	9.135.000	12 bln	9.591.750	12 bln	10.071.338	12 bln	10.574.904	12 bln	11.103.650	60 bln	50.476.641		
1	25	01	08		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat tulis kantor	12 bln	12 bln	22.585.500	12 bln	23.714.775	12 bln	24.900.514	12 bln	26.145.539	12 bln	27.452.816	60 bln	124.799.145		
1	25	01	11		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pembayaran barang cetakan dan penggandaan	12 bln	12 bln	16.800.000	12 bln	17.640.000	12 bln	18.522.000	12 bln	19.448.100	12 bln	20.420.505	60 bln	92.830.605		
1	25	01	12		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bln	12 bln	5.250.000	12 bln	5.512.500	12 bln	5.788.125	12 bln	6.077.531	12 bln	6.381.408	60 bln	29.009.564		
1	25	01	17		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembelian makan dan minum Pegawai	11 bln	11 bln	72.672.600	11 bln	76.306.230	11 bln	80.121.542	11 bln	84.127.619	11 bln	88.334.000	55 bln	401.561.990		

1	25	01	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Pembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultansi keluar daerah	12 bln	12 bln	84.00 0.000	12 bln	88.20 0.000	12 bln	92.61 0.000	12 bln	97.24 0.500	12 bln	102.1 02.52 5	60 bln	464.15 3.025		
1	25	01	19	Kegiatan Pelayanan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang	Pembayaran jasa Pelelangan dan pengadaan Barang dan Jasa	10 bln	10 bln	5.806. 500	10 bln	6.096. 825	10 bln	6.401. 666	10 bln	6.721. 750	10 bln	7.057. 837	50 bln	32.084 .578		
1	25	01	20	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran	Pembayaran biaya lembur pegawai/Pembayaran jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 bln	12 bln	613.9 98.00 0	12 bln	644.6 97.90 0	12 bln	676.9 32.79 5	12 bln	710.7 79.43 5	12 bln	746.3 18.40 6	60 bln	3.392. 726.53 6		
1	25	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelaksanaan tugas kantor	100%	100%	741.0 34.22 0	100%	530.5 85.93 1	100%	551.3 65.22 8	100%	588.4 33.48 9	100%	616.8 55.16 3	100%	3.028. 274.03 1	Diskominfotik	
1	25	02	03	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Media Center yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		1	25	02	05	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembelian kendaraan dinas/operasional		3	unit	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	unit	250.000.000					
		1	25	02	07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembelian perlengkapan gedung kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		1	25	02	09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembelian peralatan gedung kantor	12 bln	12	bln	391.860.000	12	bln	411.453.000	12	bln	432.025.650	12	bln	453.626.933	12	bln	476.308.279	60	bln	2.165.273.862		
		1	25	02	10	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Pembelian Mebeleur kantor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		1	25	02	22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor		-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-			
		1	25	02	24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional	12 bln	12	bln	59.174.220	12	bln	62.132.931	12	bln	65.239.578	12	bln	68.501.556	12	bln	71.926.634	60	bln	326.974.919		
		1	25	02	26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor		-	12	bln	20.000.000	12	bln	21.000.000	12	bln	22.050.000	12	bln	23.152.500	12	bln	24.310.125	60	bln	110.512.625	

1	25	02	27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan peralatan gedung kantor		12 bln	20.00 0.000	12 bln	21.00 0.000	12 bln	22.05 0.000	12 bln	23.15 2.500	12 bln	24.31 0.125	60 bln	110.51 2.625		
1	25	02	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Pemeliharaan mebeluer		-	-	-	-	-	10.00 0.000	-	-	-	-	-	-		
1	25	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	26.04 0.000	100%	27.34 2.000	100%	14.35 4.550	100%	15.07 2.278	100%	21.82 5.891	100%	104.63 4.719	Diskominfotik	
1	25	03	01	Kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pembelian mesin absensi elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000. 000	-	-		
1	25	03	02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapanya	Jumlah pakaian dinas pegawai yang disediakan	31 psg PDH	33 psg PDH	13.02 0.000	35 psg PDH	13.67 1.000	37 psg PDH	14.35 4.550	39 psg PDH	15.07 2.278	41 psg PDH	15.82 5.891	18 psg 5	71.943 .719		
1	25	03	03	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan pegawai yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

					1 25 03 05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-Hari tertentu	Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu pegawai yang disediakan	-	-	13.02 0.000	35	psg	13.67 1.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
Menyediakan data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimasi berbasis teknologi (IT)	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis IT	terperuhinya data cepat, tepat dan akurat serta sistem komunikasi yang optimasi berdasarkan informasi dan teknologi (IT)	1 23 15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	terpenuhinya data base statistik daerah			20%	435.0 00.00 0	20%	456.7 50.00 0	20%	479.5 87.50 0	20%	503.5 66.87 5	20%	528.7 45.21 9	100%	2.403. 649.59 4	Diskominfotik			
			1 23 15 01	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Tersedianya dokumen data dan statistik daerah	-	4 dok	435.0 00.00 0	4 dok	456.7 50.00 0	4 dok	479.5 87.50 0	4 dok	503.5 66.87 5	4 dok	528.7 45.21 9	20 dok	2.403. 649.59 4					
			1 23 15 02	Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1 23 15 03	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Tersedianya dokumen data PDRB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			1 23 15 04	Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	Jumlah data PDRB yang diolah, diupdate dan dianalisis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

					1 23 15 05	Kegiatan Forum Satu Data	Tersedianya dokumen data															
					1 25 15	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis TIK dan masyarakat dapat terlayani secara elektronik	20%	20%	5.127.000,00	20%	3.463.350,00	20%	2.879.100,00	20%	3.023.055,00	20%	3.574.207,75	100%	18.066.712,75	Diskominfotik	
					1 25 15 01	Kegiatan Fasilitasi Penyempurnaan Peraturan Perundungan Penyiaran dan KMIP	Jumlah peraturan yang disempurnakan															
					1 25 15 02	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah SKPK yang jaringan komunikasi dan informasinya dibina serta dikembangkan	-	1 keg	2.440.000,00	1 keg	1.062.000,00	1 keg	1.115.100,00	1 keg	1.170.855,00	1 keg	1.229.397,75	5 keg	7.017.352,75		

1	25	15	03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi yang dilakukan	-	-	682.000.00	-	716.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	25	15	04	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Jumlah penelitian dan pengembangan Iptek yang dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	25	15	05	Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	-	-	5.000.000	-	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	25	15	06	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia	12 bln	12 bln	1.600.000.000	12 bln	1.680.000.000	12 bln	1.764.000.000	12 bln	1.852.200.000	12 bln	1.944.810.000	60 bln	8.841.010.000	-	-	-	-	-
1	25	15	07	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika	Jumlah Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan	1 keg	1 keg	400.000.000	-	-	-	-	-	-	1 keg	400.000.000	2 keg	800.000.000	-	-	-	-	-

					Kegiatan Optimalisasi Peran Media Center Pemerintah Daerah	Gedung Media Center yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	25	16			<i>Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi</i>	terpenuhinya data base Infokom	0%	20%	69.00 0.000	20%	72.45 0.000	20%	76.07 2.500	20%	79.87 6.125	20%	83.86 9.931	100%	381.26 8.556	Diskominfotik
1	25	16	01		Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan komunikasi	Jumlah penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan	-	1 keg	69.00 0.000	1 keg	72.45 0.000	1 keg	76.07 2.500	1 keg	79.87 6.125	1 keg	83.86 9.931	5 keg	381.26 8.556	
1	25	17			<i>Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi</i>	terpenuhinya peningkatan SDM bidang Kominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

					Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah pelatihan SDM bidang Kominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	25	18	01	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	terserapnya informasi pelaksanaan kepemerintahan kepada masyarakat	20%	20%	754.366.500	20%	2.292.084.825	20%	2.406.689.066	20%	2.527.023.520	20%	2.653.374.696	100%	10.633.538.606	Diskominfotik		
1	25	18	01	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	12 bln	12 bln	640.000.000	12 bln	2.172.000.000	12 bln	2.280.600.000	12 bln	2.394.630.000	12 bln	2.514.361.500	60 bln	10.001.591.500			
1	25	18	02	Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat	12 bln	12 bln	34.366.500	12 bln	36.084.825	12 bln	37.889.066	12 bln	39.783.520	12 bln	41.772.696	60 bln	189.896.606			

					1 25 18 03	Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang menerima penyebarluasan informasi	10 kali	10 kali	80.00 0.000	10 kali	84.00 0.000	10 kali	88.20 0.000	10 kali	92.61 0.000	10 kali	97.24 0.500	50 kali	442.05 0.500		
Jumlah								8.063. 145.6 20		7.798. 802.9 01		7.411. 220.9 96		7.791. 282.0 46		8.585. 846.1 48		39.650 .297.7 11				

Banda Aceh, 10 Februari 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

dan Statistik Kota Banda Aceh

Ir. Syukri, M.Sc

Nip. 195912311990031025

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

RPJM mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJM Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrembang, musrena dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rincian indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dengan mengacu pada RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Lampiran 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel Indikator RPJM 2017 - 2022 sesuai Permendagri No 54 Tahun 2010

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kerja Pada Awal RPJM	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir RPJM D	Keterangan	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Website milik Pemerintah Daerah	Semua SKPD	41	45	45	45	45	45	45		
2	Pameran Expo	1 kali / tahun	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	6 kali		



3	Desiminasi dan Distribusi Informasi melalui :										
	- Media Massa	12 kali /tahun	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	72 kali	
	- Media Online (Website)	Setiap Hari	setiap hari	setia p hari	setiap hari	setia p hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	
	- Media Tradisional Pertunjukan Rakyat	12 kali /tahun	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	72 kali	
	- Media Interpersonal	12 kali /tahun	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	72 kali	
	- Media Luar Ruang	12 kali /tahun	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	72 kali	
4	Cakupan pengenangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di Tingkat Kecamatan (%)	Jumlah KIG x 100 % Jlh Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
5	Layanan koneksi jaringan Internet dan Intranet di lingkungan Pemerintah Kota	Setiap hari	Setiap hari	Setia p hari	Setiap hari	Setia p hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari		
6	Jumlah pembangunan aplikasi/ Sistem Informasi berbasis e-government	Jumlah Aplikasi	88	4	4	4	4	4	108		



		<u>Jumlah Jaringan Telepon Genggam stasioner</u>							
7	Jumlah Jaringan Komunikasi	<u>Jumlah Warnet</u> x 1000 <u>jumlah Penduduk</u>							
8	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk								
9	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Jumlah Surat Kabar	28	28	28	28	28	28	
10	Jumlah penyiaran radio nasional/ lokal dan TV Nasional/ lokal	Jumlah Stasiun	31	31	31	31	31	31	
11	Buku Banda Aceh dalam angka	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
12	Buku PDRB Kota Banda Aceh	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	

Banda Aceh, 17 Maret 2016

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi
dan Statistik Kota Banda Aceh

Ir. Syukri, M.Sc

Nip. 195912311990031025



77 | 70